

# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJ-IP) 2019**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KAB. SIDENRENG RAPPANG**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2019.

LKj Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019 disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Penyusunan LKj Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Komitmen dalam penyusunan LKj Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019 telah banyak membuahkan hasil yang positif. 2 indikator kinerja utama telah memenuhi target yang ditetapkan. Dengan tersusunnya LKj Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Pangkajene Sidenreng, 27 Januari 2020  
Kepala Badan Kesbang dan Politik



**INDAH SAID RUM, SE, M.A.P**

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19640610 199307 2 002

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Pelaporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. LKj Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2019 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi disusun secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKj ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah dicanangkan pada tahun 2019 telah berhasil dicapai. Kedua indikator kinerja IKU pada tahun 2019 mencapai 100% dari target yang ditetapkan.

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ke depan. Pertama, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, namun masih terdapat beberapa persoalan-persoalan di masyarakat yang belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di lingkungan pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam perbaikan pelayanan publik di tahun

yang akan datang.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vi
DAFTAR LAMPIRAN .....	vii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
I.1 Latar Belakang .....	1
I.2 Maksud dan Tujuan .....	2
I.3 Gambaran Umum Organisasi .....	2
I.4 Isu strategis .....	5
I.5 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa & Politik .....	6
I.6 Komposisi SDM Organisasi .....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	10
II.1 Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik .....	10
II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2019 .....	12
II.3 Indikator Kinerja Utama .....	13
II.4 Rencana Anggaran Tahun 2019 .....	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	16
III.1 Capaian Kinerja .....	16
III.2 Realisasi Anggaran .....	30
BAB IV PENUTUP .....	35
LAMPIRAN .....	37

## DAFTAR TABEL

Tabel	II.1 Tujuan dan Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik .....	11
Tabel	II.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik .....	12
Tabel	II.3 Program untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2019 .....	12
Tabel	II.4 Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019 .....	13
Tabel	II.5 IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik .....	13
Tabel	II.6 Rencana Belanja Badan Kesatuan Bangsa & Politik TA. 2019...	14
Tabel	II.7 Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2019 .....	14
Tabel	III.1 Pencapaian Kinerja IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	17
Tabel	III.2 Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	17
Tabel	III.3 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 .....	18
Tabel	III.4 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran1 .....	18
Tabel	III.5 Perbandingan Target Realisasi Sasaran 1 Tahun ini dengan Target Jangka Menengah .....	19
Tabel	III.6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Sasaran 1 .....	20
Tabel	III.7 Target dan Realisasi Kinerja Mendukung sasaran1 .....	21
Tabel	III.8 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 .....	25
Tabel	III.9 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 .....	26
Tabel	III.10 Perbandingan Target Realisasi Sasaran 2 Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah .....	26
Tabel	III.11 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 2 .....	27
Tabel	III.12 Target dan Realisasi Kinerja Mendukung Sasaran 2 .....	28
Tabel	III.13 Realisasi Belanja Badan Kesatuan Bangsa & Politik TA.2019 ...	30
Tabel	III.14 Pencapaian Anggaran Tahun 2019 .....	32

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	1 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik .....	7
--------	--	---

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2019
2. Pohon Kinerja Badan Kesbangpol TA. 2019
3. Rencana Aksi 2019, Pengukuran dan Monitoring Evaluasi
4. Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5. SOP Pengumpulan Data Kinerja
6. SK Penetapan Indikator Kinerja Utama
7. SK Penunjukan/Penetapan Pengumpul Laporan Kinerja
8. SK Penyusun LKj-IP 2019

## **BAB I**

### **PENDAHULAN**

#### **I.1 Latar Belakang**

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sidrap.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sidrap. LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari



prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LKj tingkat SKPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

## **I.2 Maksud dan Tujuan**

LKj Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sidrap merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, LKj menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sidrap. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

## **I.3 Gambaran Umum Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 tahun 2016 Pasal 7 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang maka diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkedudukan sebagai unsur penunjang otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dimana susunan Organisasi Badan, terdiri atas:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat
  - 1. Subbag Perencanaan
  - 2. Subbag Keuangan
  - 3. Subbag Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Hubungan antar Lembaga
  - 1. Sub bidang Kelembagaan
  - 2. Sub bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan
- d. Bidang Kesatuan Bangsa
  - 1. Sub bidang Pembauran
  - 2. Sub bidang Wawasan Kebangsaan
- e. Jabatan Fungsional
- f. UPT Badan

Adapun tugas pokok dan fungsi adalah:

**A. Kepala Badan:**

Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- 1) perumusan kebijakan di bidang hubungan antar lembaga dan bidang kesatuan bangsa;
- 2) pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan antar lembaga dan bidang kesatuan bangsa;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan antar lembaga dan bidang kesatuan bangsa;
- 4) pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**B. Sekretaris:**

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, hukum, keuangan dalam lingkungan Badan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- 1) pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan;
- 2) pengoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaporan;
- 3) pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
- 4) pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

**C. Bidang Hubungan Antar Lembaga:**

Bidang Hubungan Antar Lembaga dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang hubungan antar lembaga.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi :

- 1) penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kelembagaan dan hubungan organisasi kemasyarakatan;
- 2) penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kelembagaan dan hubungan organisasi kemasyarakatan;
- 3) penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan dan hubungan organisasi kemasyarakatan;
- 4) pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan dan hubungan organisasi kemasyarakatan; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

#### **D. Bidang Kesatuan Bangsa:**

Bidang Kesatuan Bangsa dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang kesatuan bangsa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi :

- 1) penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pembauran dan wawasan kebangsaan;
- 2) penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pembauran dan wawasan kebangsaan;
- 3) penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembauran dan wawasan kebangsaan;
- 4) pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembauran dan wawasan kebangsaan.
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

#### **E. Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

### **I.4 Isu Strategis**

Isu Strategis yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah :

#### **A. Bidang Hubungan Antar Lembaga**

1. Rendahnya pendidikan politik bagi kaum pemilih pemula dan kaum marjinal.
2. Keterwakilan perempuan dalam parlemen masih rendah.
3. Belum optimalnya pendataan ormas mengakibatkan rendahnya pengawasan terhadap ormas.

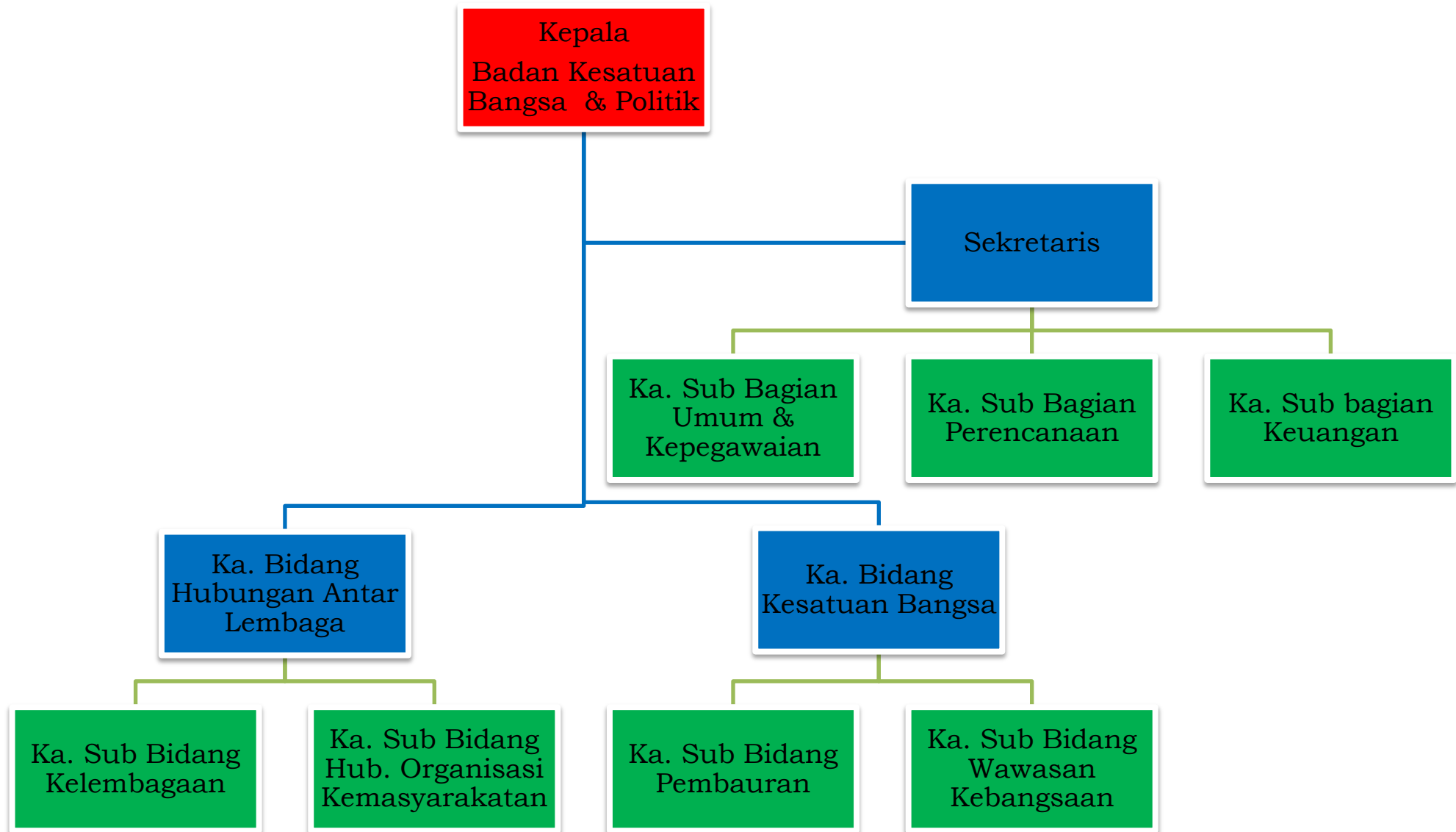
#### **B. Bidang Kesatuan Bangsa**

1. Sengketa lahan HGU di beberapa wilayah
2. Kelangkaan gas elpiji tabung 3 kg
3. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba masih tinggi
4. Unjuk rasa/aksi damai yang dapat menjadi potensi konflik

5. Rendahnya rasa nasionalisme di kalangan masyarakat yang mengakibatkan belum maksimalnya kesadaran bela negara masyarakat.

### **I.5 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

Gambar 1.  
Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



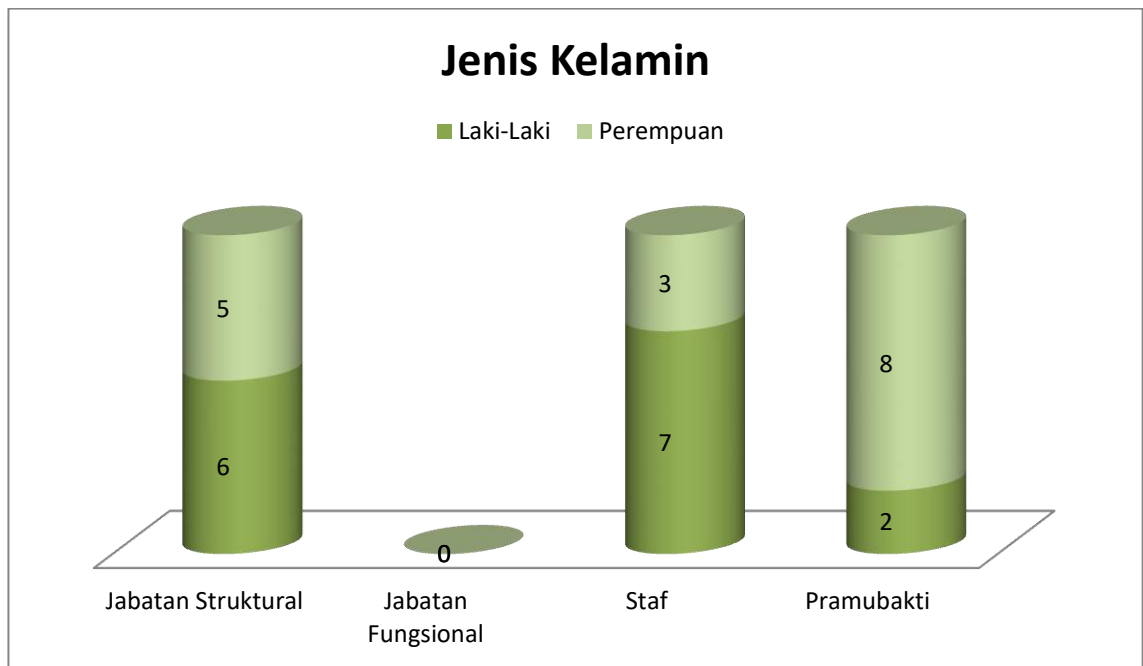
### I.6 Komposisi SDM Organisasi

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di dukung oleh sumber daya yang telah ada, diantaranya sebagai berikut:



Berdasarkan komposisi SDM di tahun 2019, Eselon II terdiri atas 1 orang yaitu plt. kepala badan; eselon III terdiri atas 3 orang yaitu: sekretaris, kabid. hubungan antar lembaga dan kabid kesatuan bangsa; eselon IV terdiri atas 7 orang yaitu: kasubag. perencanaan, kasubag keuangan, kasubag umum & kepegawaian, kasubid hubungan organisasi kemasyarakatan, kasubid kelembagaan, kasubid wawasan kebangsaan dan kasubid pembauran. sedangkan untuk staf pns terdiri atas 7 orang dan tenaga non pns atau pramubakti terdiri atas 10 orang.

Adapun komposisi berdasarkan jenis kelamin ditahun 2019 terdiri atas 15 orang laki-laki dan 16 orang perempuan.





## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### II.1 Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023.

Sebagai penerjemahan kebijakan politik Bupati dan wakil bupati sebagai kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA menjadi pijakan bagi perencanaan strategis SKPD, termasuk hingga ke level perencanaan tahunan. Berikut diuraikan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023 yang menjadi kemudian dijabarkan ke dalam penyusunan renstra RENSTRA 2018-2023.

Visi: **“Terwujudnya Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera”** dan misi sebagai berikut:

- Misi 1: Memajukan dan meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan dan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat.
- Misi 2: Memajukan usaha agribisnis, UMKM dan industri pengolahan berbasis petik, olah, kemas dan jual.
- Misi 3: Mengembangkan kerjasama investasi daerah dan penyediaan lapangan kerja baru
- Misi 4: Mengembangkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah dalam memperlancar mobilitas arus barang dan jasa
- Misi 5: Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan *good governance* dan *electronic governance*.
- Misi 6: Mengembangkan dan memajukan kawasan pedesaan melalui konsep desa cerdas (smart village), sehat dan mandiri
- Misi 7: Memajukan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama

serta meningkatkan kualitas budaya lokal sebagai basis nilai dalam menciptakan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif.

Misi yang berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tercantum pada misi ke 7 yaitu: **“Memajukan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama serta meningkatkan kualitas budaya lokal sebagai basis nilai dalam menciptakan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif.”**

#### **A. Tujuan**

Mengacu kepada visi misi yang telah ditetapkan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyusun tujuan yang hendak dicapai sebagai berikut:

**“Mewujudkan Stabilitas Keamanan dan Kenyamanan di Wilayah Kab. Sidrap”**

#### **B. Tujuan dan Indikator Kinerja**

Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing tujuan strategis diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel II.1  
Tujuan dan Indikator Kinerja  
Badan Kesatuan Bangsa & Politik

TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Mewujudkan stabilitas keamanan dan kenyamanan di wilayah kab. Sidrap	Persentase Angka Kriminalitas per 10.000	%	15,27	12,12

#### **C. Sasaran dan Indikator Kinerja**

Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah:

1. Menguatnya persatuan dan kesatuan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan demokrasi.

Tabel II.2  
Sasaran dan Indikator Kinerja  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
1. Menguatnya persatuan dan kesatuan masyarakat	Persentase Penyelesaian konflik (SARA, IPOLEKSOSBUD)	%	100	100
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan demokrasi	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu	%	80,26	84,30

**D. Program untuk pencapaian sasaran.**

Berdasarkan tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel II.3  
Program untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2019

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
1. Menguatnya persatuan dan kesatuan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</li> <li>2. Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal</li> <li>3. Pengembangan Wawasan Kebangsaan</li> <li>4. Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan</li> </ol>
2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan demokrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan Politik Masyarakat</li> </ol>

**II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2019**

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK 2019 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA 2018-2023, RENCANA KERJA (RENJA) 2019, IKU dan APBD TA. 2019. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah menetapkan PK sebagai berikut:

Tabel II.4  
Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2019
1. Menguatnya persatuan dan kesatuan masyarakat	Persentase penyelesaian konflik (SARA, IPOLEKSOSBUD)	%	100
2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan demokrasi	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu	%	83,60

### II.3 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah menetapkan IKU sebagai berikut:

Tabel II.5  
IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1. Menguatnya persatuan dan kesatuan masyarakat	Persentase penyelesaian konflik (SARA, IPOLEKSOSBUD)	%	$\frac{\text{Jumlah konflik yg tertangani}}{\text{Jumlah konflik}} \times 100\%$	Bidang Kesatuan Bangsa Bidang Hub. Antar Lembaga
2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan demokrasi	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu	%	$\frac{\text{Jumlah Pengguna Hak Pilih}}{\text{Jumlah DPT}} \times 100\%$	Bidang Hub. Antar Lembaga

### II.4 Rencana Anggaran Tahun 2019

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik maka jumlah pendanaan yang di mungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 3.181.046,- yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja tidak langsung di gunakan untuk membiayai gaji dan tunjangan pegawai, sedangkan pada belanja langsung, Rp. 1.124.614.000 digunakan untuk membiayai sasaran strategis dan sisanya Rp. 625.628.000 dianggarkan untuk

membiayai kegiatan rutin kantor. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.6  
Rencana Belanja  
Badan Kesatuan Bangsa & Politik TA 2019

No	Uraian	Rencana (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	1.430.804.000	45
2	Belanja Langsung	1.750.242.000	55
Jumlah		3.181.046.000	100

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel II.7  
Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2019

SASARAN	INDIKATOR	ANGGARAN (Rp)	% ANGGARAN
1. Menguatnya persatuan dan kesatuan masyarakat	Persentase penyelesaian konflik (SARA, IPOLEKSOSBUD)	1.025.634.000	91,20
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan demokrasi	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu	98.980.000	8,80
TOTAL		1.124.614.000	100

Pada tabel di atas, total anggaran yang di alokasikan guna mendukung sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebesar Rp. 1.124.614.000 , dimana 91,20% mendukung sasaran 1 yaitu : Menguatnya persatuan dan kesatuan masyarakat dengan nilai Rp. 1.025.634.000. Adapun program yang mendukung sasaran tersebut adalah:

1. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan sebesar Rp. 53.939.000,-
2. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Rp. 605.842.000,-

3. Program pengembangan wawasan kebangsaan Rp. 73.564.000,-
4. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Rp. 292.289.000,-

Sedangkan 8,80% anggaran mendukung sasaran 2: " Meningkatkan kualitas penyelenggaraan demokrasi" Adapun rincian program yang mendukung sasaran tersebut adalah:

1. Program pendidikan politik masyarakat, dengan anggaran sebesar Rp. 98.980.000,-

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **III.1 Capaian Kinerja**

##### **A. Capaian Indikator Kinerja Utama**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang selaku pengembang amanah masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Program/ Kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2019.

Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 ini akan dijelaskan capaian indikator kinerja utama (IKU) yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dalam RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang. Pencapaian kinerja IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang secara ringkas digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.1  
Pencapaian Kinerja IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Menguatnya persatuan dan kesatuan masyarakat	%	100	100	100%
2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan demokrasi	%	83,60	83,60	100%

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran strategis dalam Renstra OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 sebanyak 2 indikator, dan dari jumlah tersebut dapat dibagi berdasarkan kriteria sebagai berikut:

Tabel III.2  
Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1	91 <	Sangat Tinggi	ST
2	76 < 90	Tinggi	T
3	66 < 75	Sedang	S
4	51 < 65	Rendah	R
5	< 50	Sangat Rendah	SR

Dari 2 IKU di atas, menunjukkan bahwa semua indikator telah memenuhi kriteria “Sangat Tinggi” yaitu 100%.

Analisis keberhasilan pencapaian IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 akan dijelaskan pada analisis capaian kinerja sasaran strategis di bawah.

## **B. Capaian Kinerja Organisasi**

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019, dapat dikemukakan bahwa sasaran-sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai,. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut:



**Sasaran 1:**  
**Menguatnya persatuan dan kesatuan masyarakat**

**a. Perbandingan antar target dan realisasi kinerja tahun ini.**

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel dibawah selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk tahun 2019. Pencapaian Indikator tahun 2019 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel III.3  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Menguatnya persatuan dan kesatuan masyarakat	Persentase penyelesaian konflik (SARA, IPOLEKSOSBUD)	%	100	100	100
RATA - RATA CAPAIAN					100

Indikator kinerja pada sasaran strategis ini yaitu Persentase penyelesaian konflik (SARA, IPOLEKSOSBUD) dengan capaian 100%.

**b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Tabel III.4  
Perkembangan capaian indikator kinerja sasaran 1

Indikator Kinerja	Realisasi			Capaian (%)		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Persentase penyelesaian konflik (SARA, IPOLEKSOSBUD)	100	100	100	100	100	100
Rata -Rata Capaian				100	100	100

membandingkan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun 2017 dan 2018, maka rata-rata capaian kinerja pada sasaran “Menguatnya persatuan dan kesatuan masyarakat” sudah mencapai 100%.

**c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**

Tabel III.5  
Perbandingan target realisasi sasaran 1 tahun ini  
dengan target jangka menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Sampai dengan Tahun Ini	Kondisi Kinerja target Jangka Menengah
Persentase penyelesaian konflik (SARA, IPOLEKSOSBUD)	%	100	100

Jika melihat perbandingan realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2019 terhadap target kinerja jangka menengah, indikator ini telah mencapai target jangka menengah yaitu 100%.

**d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan**

Tercapainya sasaran “menguatnya persatuan dan kesatuan masyarakat” dapat diukur melalui indikator: Persentase penyelesaian konflik (SARA,IPOLEKSOSBUD)” dimana target dan realisasi pada tahun 2019 adalah sebesar 100%.

Peristiwa konflik pada tahun 2019 terjadi sekitar bulan September di desa persiapan Talawe kec. Watang Sidenreng. Konflik ini muncul akibat adanya pertikaian antara dua oknum kepala desa yang masing-masing merasa berhak untuk menduduki jabatan Desa Persiapan Talawe. Konflik ini berhasil di tangani dengan melalui mediasi yang di lakukan oleh tim Forkopimda bersama masyarakat setempat.

Disamping penyelesaian konflik tersebut diatas beberapa potensi konflik berhasil diredam oleh forum-forum yang berperan dalam deteksi dini dan cegah dini dalam mengantisipasi setiap ancaman, tantangan dan hambatan yang terjadi dimasyarakat diantaranya Forkopimda, FKDD, FKUB, FPK, Pengawasan Ormas dan kegiatan-kegiatan berupa

penyuluhan/pembinaan yang di lakukan terus menerus kepada masyarakat dalam rangka peningkatan wawasan kebangsaan.

**e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.**

Tabel III.6  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran I

Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja (>100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Menguatnya persatuan dan kesatuan masyarakat	Persentase Penyelesaian konflik (SARA, IPOLEKSOSBUD)	100	97,24	2,76
Rata-rata capaian kinerja		100		

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2019 untuk pencapaian sasaran “Menguatnya persatuan dan kesatuan masyarakat.” ini adalah sebesar Rp. 1.025.634.000,-. Dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 997.366.800,- atau 97,24%. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% berarti tingkat efisiensi sebesar 2,76%.

**f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja.**

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran “Menguatnya persatuan dan kesatuan masyarakat ini adalah sebanyak 4 program dan 9 kegiatan.

Anggaran yang dialokasikan guna mendukung pencapaian sasaran 1 adalah sebesar Rp. 1.025.634.000 dengan realisasi sebesar Rp. 997.366.800 atau sebesar 97,24%. Berikut ini disajikan program dan kegiatan beserta capaian target kinerja pada masing-masing kegiatan.

Tabel III.7  
Target dan realisasi kinerja mendukung sasaran 1

PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			
❖ Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	130 org	130 org	100%
Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			
❖ Forum Silaturahmi Forkopimda bersama masyarakat	12 bln	12 bln	100%
❖ Penguatan pusat komunikasi dan informasi kewaspadaan dini	12 bln	12 bln	100%
❖ Pemantauan dan pengendalian penyakit masyarakat	2 kali	2 kali	100%
Pengembangan wawasan kebangsaan			
❖ Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	65 org	65 org	100%
❖ Pembinaan kerukunan umat beragama (FKUB)	30 org	30 org	100%
Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	420 org	420 org	100%
❖ Seminar, Talkshow diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	198 org	198 org	100%
❖ Pembinaan forum pembauran kebangsaan (FPK)	100 org	100 org	100%
❖ Monitoring, evaluasi dan pengawasan ormas			

Program yang mendukung sasaran : "meningkatnya persatuan dan kesatuan masyarakat" adalah sebanyak 4 program, yaitu:

- Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. Indikator kinerja pada program ini adalah persentase masyarakat yang mendapatkan penyuluhan bela negara, dengan capaian kinerja sebesar 100%. Terdiri atas kegiatan:

1. Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan.

Kegiatan ini berupa penyuluhan dalam rangka peningkatan kesadaran bela negara yang dilaksanakan di Desa Lasiwala pada

tanggal 8 April 2019. Indikator kinerja adalah jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan sebanyak 65 orang dan telah mencapai target realisasi sebesar 100%. Adapun peserta penyuluhan adalah masyarakat di kecamatan Baranti.

- Program Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal. Indikator kegiatan yaitu persentase koordinasi dalam rangka deteksi dini dan cegah dini dengan realisasi kinerja sebesar 100%. terdiri atas kegiatan:

1. Forum Silaturahmi Forkopimda bersama masyarakat

Forum silaturahmi Forkopimda bersama masyarakat merupakan sebuah forum yang di bentuk untuk menjalin komunikasi yang lebih efektif antara sesama anggota forkopimda terdiri atas: Bupati Sidenreng Rappang, Dandim 1420, Kapolres, Kejari dan ketua DPRD Forum ini di bentuk guna membahas hal-hal yang terjadi di masyarakat. Adapun agenda rutin forkopimda ini adalah rapat koordinasi yang dilakukan selama 12 bulan. Indikator kinerja adalah jumlah koordinasi tim Forkopimda dan telah mencapai target sebesar 100%, disamping koordinasi lainnya menyesuaikan kondisi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

2. Penguatan Pusat Komunikasi dan informasi kewaspadaan dini.

Pusat komunikasi dan informasi kewaspadaan dini terbentuk berdasarkan permendagri no. 2 tahun 2018 dimana merupakan wadah yang menyediakan informasi terkait kewaspadaan dini daerah. Pusat komunikasi ini didukung dengan terbentuknya Tim kewaspadaan dini daerah yang terdiri atas Badan Kessbangpol, unsur intelijen dari berbagai instansi vertikal seperti: BIN, Polres, Kodim, dan Kejaksaan. Instansi ini bersinergi melakukan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini daerah, membina dan memelihara ketentraman serta ketertiban masyarakat untuk mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di daerah serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan melalui deteksi dini dan cegah dini. Tim kewaspadaan dini menerbitkan rekomendasi yang di tujukan kepada Bupati Sidenreng Rappang. Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah laporan kewaspadaan dini,

dimana telah mencapai realisasi sebanyak 12 dokumen laporan kewaspadaan dini.

### 3. Pemantauan dan Pengendalian Penyakit Masyarakat

Kegiatan ini berupa kegiatan pemantauan tempat hiburan malam/rumah bernyanyi yang ada di wilayah kab. Sidenreng rappang. Tim ini terdiri atas Badan kesbangpol, Dinas Satpol PP, Dinas Dukcapil, Dinas PTSP, Polres sidrap, TNI, BIN dan Kejaksaan. Melalui kegiatan ini beberapa tempat hiburan malam/rumah bernyanyi yang melanggar ijin sudah di tutup. Kegiatan ini bertujuan selain menindak THM/rumah bernyanyi yang melanggar perizinan, juga menekan angka kriminalitas terutama miras dan peredaran narkoba. Kegiatan pemantauan dilakukan sebanyak 2 kali dan telah necapai target kinerja sebesarr 100%.

- Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan. Program ini memiliki 2 indikator kinerja , pertama: persentase masyarakat yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan dengan realisasi capaian 100% dan indikator yang kedua adalah: persentase ormas yang bertentangan dengan asas pancasila dengan realisasi 0%. Program ini terdiri atas kegiatan:

#### 1. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

Kegiatan ini berupa kegiatan penyuluhan yang di laksanakan di Baranti pada tanggal 4 April tahun 2019 dengan peserta berjumlah 65 orang dimana anggota peserta adalah masyarakat setempat. Realisasi kinerja mencapai 100% dimana indikator kinerjanya adalah jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan.

#### 2. Pembinaan kerukunan umat beragama

Kegiatan ini berupa rapat koordinasi tingkat kabupaten antar dewan penasehat FKUB dan para pengurus FKUB guna membahas hal-hal terkait kerukunan antar dan inter umat beragama di wilayah kab. Sidrap. Indikator kinerjanya adalah jumlah dewan penasehat dan pengurus FKUB yang berkoordinasi mencapai target sebanyak 30 orang atau 100%.

- Program Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan. Realisasi capaian kinerja pada indikator proram ini adalah sebesar 100% dimana indikatornya adalah persentase masyarakat yang mendapatkan penyuluhan wawasan kebangsaan, terdiri atas kegiatan:

1. Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan

Indikator kinerja pada kegiatan ini yaitu jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan dalam rangka peningkatan wawasan kebangsaan dengan target sebanyak 420 orang. Kegiatan ini terdiri atas penyuluhan wawasan kebangsaan dan sosialisasi perpres no. 7 Tahun 2018. Kegiatan ini dilaksanakan di beberapa kecamatan seperti kecamatan Panca Lautang, Kec. Tellu Limpoe, Kec. Maritengngae dan Kec. Pitu Riawa. Capaian target kinerja pada kegiatan ini terealisasi sebesar 100%

2. Pembinaan Pembauran Kebangsaan

Pembinaan pembauran kebangsaan di realisasikan melalui kegiatan rapat koordinasi tk. kabupaten pada tanggal 18 november 2019 yang terdiri atas dewan pembina dan pengurus FPK yang kemudian dilanjutkan dengan pelantikan pengurus tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan pada tanggal 22 November 2019. Tanggal 28 November, Badan kesbangpol melakukan pembinaan pembauran kebangsaan kepada masyarakat dari 11 kecamatan. Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan pembauran kebangsaan dan rapat koordinasi FPK menjadi indikator pada kegiatan ini, dengan realisasi capaian sebesar 100%.

3. Monitoring, evaluasi dan pengawasan ormas

Monitoring, evaluasi dan pengawasan ormas dilakukan dengan mewajibkan ormas-ormas yang aktif dan berdomilisi di wilayah kab. Sidrap melaporkan keberadaannya ke badan kesbangpol dan mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi ormas yang tidak berbadan hukum. Kegiatan ini mempedomani permendagri 56 tahun 2017 tentang pengawasan organisasi kemasyarakatan di lingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah dan permendagri 57 tahun 2017 tentang pendaftaran dan pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan.

Bentuk pengawasan lain yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol terhadap aktivitas keberadaan ormas adalah dengan mewajibkan bagi ormas untuk mendapatkan surat rekomendasi kegiatan jika hendak melakukan kegiatan di wilayah kab. Sidrap dan mewajibkan orang/organisasi untuk mendapatkan rekomendasi penelitian bagi yang hendak melakukan penelitian di wilayah kab. Sidrap.

Surat keterangan terdaftar (SKT) yang terbit pada tahun 2019 adalah sebanyak 23 SKT. Rekomendasi kegiatan yang diterbitkan selama tahun 2019 adalah sebanyak 106 rekomendasi dan rekomendasi penelitian sebanyak 863 rekomendasi.

Untuk mensosialisasikan aturan ini, Badan Kesbangpol melakukan penyuluhan terkait sosialisasi terkait undang-undang ormas di wilayah kec. Maritengae. Capaian kinerja pada kegiatan ini mencapai 100% dimana indikatornya adalah jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan sosialisasi undang-undang ormas.

**Sasaran 2:**  
**Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Demokrasi**

**a. Perbandingan antar target dan realiasi kinerja tahun ini.**

Pencapaian Indikator kinerja untuk sasaran “Meningkatnya kualitas penyelenggaraan demokrasi” secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel III.8  
Capaian Indikator Kinerja sasaran 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan demokrasi	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu	%	83,60	83,60	100
RATA - RATA CAPAIAN					100



Indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini yaitu “ Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu dimana capaian realisasinya sebesar 100% .

**b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Tabel III.9  
Perkembangan capaian indikator kinerja sasaran 2

Indikator Kinerja	Realisasi		Capaian (%)	
	2018	2019	2018	2019
Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu	100	100	100	100
Rata -Rata Capaian			100	100

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka rata-rata capaian kinerja pada sasaran “Meningkatkan kualitas penyelenggaraan demokrasi sudah mencapai 100%.

**c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**

Tabel III.10  
Perbandingan target realisasi sasaran 2 tahun ini dengan target Jangka menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Sampai dengan Tahun Ini	Kondisi Kinerja target Jangka Menengah
Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu	%	83,60	84,30

**d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.**

Keberhasilan/peningkatan pencapaian indikator pada sasaran ini didukung dengan sinergitas antara Badan Kesbangpol bersama organisasi politik dan KPU dalam memberikan penyuluhan terkait pendidikan politik kepada masyarakat. Penyuluhan ini menjadi salahsatu faktor yang

menpengaruhi antusias masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam menggunakan hak suaranya pada pemilihan Presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif tahun 2019.

Peningkatan antusias masyarakat kab. Sidenreng Rappang untuk turut serta terlibat dalam pesta demokrasi dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat dari tahun ke tahun semakin meningkat. Angka partisipasi tahun 2014 pada pemilihan anggota legislatif adalah sebesar 76,01% dan pemilihan presiden sebesar 69,86%. Tahun 2018, pada pemilihan kepala daerah tingkat partisipasi masyarakat adalah sebesar 80,26% dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 83,60% pada pilpres maupun pada pemilihan anggota legislatif.

Untuk mencapai target jangka menengah pada pemilihan selanjutnya diperlukan komitmen dan kerja keras dari berbagai pihak untuk turut serta menyukseskan penyelenggaraan pemilu berikutnya. Salahsatu tantangan yang masih harus diselesaikan di tahun mendatang adalah keterwakilan kaum perempuan yang masih rendah di parlemen dan fokus pendidikan politik terutama bagi pemilih pemula dan kelompok marjinal.

**e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.**

Tabel III.11  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 2

Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja (>100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Demokrasi	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu	100	95,20	4,80
Rata-rata capaian kinerja		100		

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2019 untuk pencapaian sasaran “Meningkatnya kualitas penyelenggaraan demokrasi”. ini adalah sebesar Rp. 98.980.000 dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 94.229.000 atau 95,20%. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% berarti tingkat efisiensi sebesar 4,80%.

**f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja.**

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran “Meningkatnya kualitas penyelenggaraan demokrasi” ini adalah sebanyak 1 program dan 2 kegiatan.

Berikut ini disajikan program dan kegiatan beserta capaian target kinerja pada masing-masing kegiatan.

Tabel III.12  
Target dan realisasi kinerja mendukung sasaran 2

<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN (%)</b>
Pendidikan politik masyarakat			
❖ Penyuluhan kepada masyarakat	130 org	130 org	100%
❖ Penyusunan administrasi bantuan parpol	11 dok	11 dok	100%

Indikator pada program yang mendukung sasaran 2 adalah persentase masyarakat dan SDM partai politik yang mendapatkan pendidikan politik mencapai 100%. Adapun kegiatan yang mendukung sasaran ini yaitu:

1. Penyuluhan kepada masyarakat.

Kegiatan penyuluhan ini meliputi sosialisasi undang-undang pemilu yang di laksanakan di desa Tacimpo pada tanggal 11 April 2019 dan tanggal 12 April 2019 di desa Kampale kec. Dua pitue, dimana masing-masing peserta sebanyak 65 orang di tiap desa yang berasal dari masyarakat setempat. Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan pendidikan politik dengan realisasi capaian sebesar 100%.

2. Penyusunan administrasi bantuan keuangan parpol.

Kegiatan ini terdiri atas dua kegiatan berupa, verifikasi atas Laporan Pertanggungjawaban bantuan keuangan parpol tahun sebelumnya dan pelatihan penyusunan administrasi laporan bantuan keuangan parpol yang diselenggarakan pada tanggal 16 s/d 17 juli 2019 di parepare, yang di hadiri oleh 44 orang peserta yang terdiri atas para pengurus partai politik yang mendapatkan bantuan keuangan. Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah jumlah dokumen laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan parpol, dengan target sebanyak 11 dokumen dan telah mencapai target realisasi sebesar 100%.

### **C. Capaian Sasaran Pendukung**

#### **Meningkatnya dukungan terhadap penyelenggaraan layanan urusan kesbangpol**

Sasaran ini merupakan sasaran pendukung pencapaian dari sasaran utama yaitu menguatnya persatuan dan kesatuan masyarakat dan meningkatnya kualitas penyelenggaraan demokrasi. Sasaran ini di dukung oleh 3 program yaitu: Pelayanan administrasi perkantoran dengan alokasi anggaran Rp.462.865.000 dimana realisasi fisiknya sebesar 99,52% dan keuangan sebesar 91,35%. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan alokasi anggaran sebesar Rp.136.075.000, dimana realisasi fisik sebesar 91,19% dan keuangan sebesar 85,86%. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 26.688.000 dimana realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 95,50%. Program-program ini bertujuan untuk mewujudkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang transparan dan akuntabel. Kegiatan yang mendukung program ini adalah penyusunan rencana kerja serta monitoring dan evaluasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan hasil berupa dokumen Renstra 2018-2023, Rencana Kerja 2020, RKA/RKAP, DPA/DPPA, Laporan Monev dan keuangan pertriwulan. Kegiatan Penatausahaan keuangan meliputi penyediaan dokumen keuangan termasuk Catatan Atas Lapoan Keuangan (CALK) dan penatausahaan administrasi kepegawaian serta pemeliharaan gedung, peralatan dan kendaraan dinas/operasional kantor.

Kendala yang dihadapi dalam program ini adalah masih rendahnya kuantitas dan kualitas SDM aparatur serta sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sehingga diperlukan pelaksanaan pelatihan/bimtek bagi SDM aparatur serta pengadaan sarana dan prasarana guna mendukung optimalnya kinerja pelayanan.

#### **Angka kriminalitas**

Tujuan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah mewujudkan stabilitas keamanan dan kenyamanan di wilayah kab. Sidrap dengan indikator : persentase angka kriminalitas per 10.000 penduduk dimana target pada tahun 2018 adalah 15,27% dan tahun 2019 adalah sebesar 15,08 %.

Angka kriminalitas pada tahun 2019 adalah sebesar 385 kasus dengan jumlah penduduk pada tahun yang sama adalah sebesar 316.894 jiwa. Laki-laki 156.644 jiwa dan perempuan 160.250 jiwa. Jika dibandingkan dengan tahun 2018, angka kriminalitas pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 12,14%, atau turun sebesar 3,13%.

### **III.2 Realisasi Anggaran**

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2019 sebesar 94,66% dari total anggaran yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran “Menguatnya persatuan dan kesatuan masyarakat” sebesar 100%, sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran “Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Demokrasi” sebesar 91,22%

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2019 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang tinggi. Hal ini bisa dilihat bahwa mayoritas dari seluruh sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien karena realisasi anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan dan juga lebih kecil daripada realisasi capaian kinerjanya.

Tabel III.13  
Realisasi Belanja  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik TA. 2019

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Rencana (Rp)</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
1	Belanja Tidak Langsung	1.430.804.000	1.386.136.265	96,88%
2	Belanja Langsung	1.750.242.000	1.656.724.690	94,66%
	Jumlah	3.181.046.000	3.042.860.955	95,66%

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.14  
Pencapaian Anggaran Tahun 2019

<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>		<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
1		2	3	4
Belanja		<b>3.181.046.000</b>	<b>3.042.860.955</b>	<b>95,66</b>
Belanja Tidak Langsung		<b>1.430.804.000</b>	<b>1.386.136.265</b>	<b>96,88</b>
<b>1.</b>	Gaji dan Tunjangan	1.430.804.000	1.386.136.265	96,88
Belanja Tidak Langsung		<b>1.750.242.000</b>	<b>1.656.724.690</b>	<b>94,66</b>
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		<b>462.865.000</b>	422.810.740	91,35
<b>1.</b>	Penyediaan jasa surat menyurat	1.110.000	1.110.000	100
<b>2.</b>	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	18.000.000	14.538.685	80,77
<b>3.</b>	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	5.000.000	4.992.875	99,86
<b>4.</b>	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	4.645.000	2.970.630	63,95
<b>5.</b>	Penyediaan jasa administrasi keuangan	74.648.000	72.740.500	97,44
<b>6.</b>	Penyediaan jasa kebersihan kantor	21.628.000	21.622.000	99,97
<b>7.</b>	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.452.000	2.452.000	100
<b>8.</b>	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.840.000	2.420.000	63,02
<b>9.</b>	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	130.000.000	129.855.450	99,89
<b>10.</b>	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	6.000.000	3.683.800	61,40
<b>11.</b>	Pelayanan Administrasi Perkantoran	195.542.000	166.424.800	85,11

1		2	3	4
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		<b>136.075.000</b>	116.831.650	85,86
1.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	38.883.000	38.883.000	100
2.	Pengadaan peralatan gedung kantor	11.250.000	11.250.000	100
3.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	9.288.000	8.887.650	95,69
4.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	71.904.000	53.161.000	73,93
5.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	1.750.000	1.750.000	100
6.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	3.000.000	2.900.000	96,67
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		<b>26.688.000</b>	25.486.500	95,50
1.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	26.688.000	25.486.500	95,50
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan		<b>53.939.000</b>	53.489.000	99,17
1.	Penyiapan tenaga pengendali kewanaman dan kenyamanan lingkungan	53.939.000	53.489.000	99,17
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal		<b>605.842.000</b>	581.783.800	96,03
1.	Forum Silaturahmi FORKOPIMDA bersama Masyarakat	419.201.000	407.601.800	97,23
2.	Penguatan Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini	136.641.000	126.072.000	92,27
3.	Pemantauan dan pengendalian penyakit masyarakat	50.000.000	48.110.000	96,22
Program pengembangan wawasan kebangsaan		<b>73.564.000</b>	72.984.000	99,21
1.	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	25.000.000	25.000.000	100
2.	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	48.564.000	47.984.000	98,81



1		2	3	4
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan		<b>292.289.000</b>	289.110.000	98,91
1.	Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	165.000.000	163.600.000	99,15
2.	Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	100.299.000	99.547.000	99,25
3.	Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan ORMAS	26.990.000	25.963.000	96,19
Program pendidikan politik masyarakat		<b>98.980.000</b>	94.229.000	95,20
1.	Penyuluhan kepada masyarakat	50.000.000	49.550.000	99,10
2.	Penyusunan Administrasi Bantuan Parpol	48.980.000	44.679.000	91,22

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2019, namun juga melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) 2019, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan

program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

# LAMP IRAN



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ir. H. ANDI FAISAL RANGGONG, MT**  
Jabatan : Pjt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. DOLLAH MANDO**  
Jabatan : Bupati Sidenreng Rappang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkajene Sidenreng, September 2019

Pihak Kedua,

  
**H. DOLLAH MANDO**

Pihak Pertama,

  
**Ir. H. ANDI FAISAL RANGGONG, MT**  
NIP:19690507199903 1 010

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. SIDENRENG RAPPANG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Menguatnya persatuan dan kesatuan masyarakat	% Penyelesaian Konflik (SARA,IPOLEKSOSBUD)	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Demokrasi	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu	83,60%

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rp. 53.939.000	
2. Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Rp. 605.842.000	
3. Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Rp. 73.564.000	
4. Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Rp. 292.289.000	
5. Pendidikan Politik Masyarakat	Rp. 98.980.000	

Pangkajene Sidenreng,      September 2019

Pihak Kedua,



**H. DOLLAH MANDO**

Pihak Pertama,



**Ir. H. ANDI FAISAL RANGGONG, MT**  
NIP:196903071999031010



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. H. ANDI BAHARUDDIN, M. Adm. Pemb.**  
Jabatan : Sekretaris

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. H. ANDI FAISAL RANGGONG, MT**  
Jabatan : Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkajene Sidenreng, September 2019

Pihak Kedua,

**Ir. H. ANDI FAISAL RANGGONG, MT**  
NIP:196903071999031010

Pihak Pertama,

**Drs. H. ANDI BAHARUDDIN, M. Adm. Pemb.**  
NIP:196705052002121005



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**SEKRETARIAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KAB. SIDENRENG RAPPANG**


No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan Layanan administrasi perkantoran	100 %
2.	Meningkatnya Sarana & Prasana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %
3.	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %


	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 1.110.000
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 18.000.000
3.	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Rp. 5.000.000
4.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kend dinas/Operasional	Rp. 4.645.000
5.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Rp. 74.648.000
6.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp. 21.628.000
7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 2.452.000
8.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan dan Perundang-undangan	Rp. 3.840.000
9.	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rp. 130.000.000
10.	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam daerah	Rp. 6.000.000
11.	Pelayanan Adm Perkantoran	Rp. 195.542.000
12.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Rp. 38.883.000
13.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Rp. 11.250.000
14.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor	Rp. 9.288.000
15.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rp. 71.904.000
16.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung Kantor	Rp. 1.750.000
17.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Rp. 3.000.000
18.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Rp. 26.688.000

Pangkajene Sidenreng, September 2019

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

  
**Ir. H. ANDI FAISAL RANGGONG, MT**  
 NIP:19690507 199903 1 010

  
**Drs. H. ANDI BAHARUDDIN, M. Adm. Pemb.**  
 NIP:19670505 200212 1 005





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HALMAN, S.Sos**  
Jabatan : Kabid. Hubungan Antar Lembaga

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. H. ANDI FAISAL RANGGONG, MT**  
Jabatan : Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkajene Sidenreng, September 2019

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

  
**Ir. H. ANDI FAISAL RANGGONG, MT**  
NIP:19690507 199903 1 010

  
**HALMAN, S.Sos**  
NIP: 19621231 199803 1 166

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019  
 BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA  
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
 KAB. SIDENRENG RAPPANG**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Program</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
1.	Meningkatnya Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase masyarakat yang mendapatkan penyuluhan wawasan kebangsaan	100 %
2.	Meningkatnya masyarakat yang pemahaman tentang politik	Persentase masyarakat & SDM partai politik yang mendapatkan pendidikan politik	100 %

**KEGIATAN**

1. Monitoring Evaluasi dan Pengawasan Ormas
2. Penyuluhan Kepada Masyarakat
3. Penyusunan Administrasi Bantuan Parpol

**ANGGARAN**

- Rp. 26.990.000  
 Rp. 50.000.000  
 Rp. 48.980.000

Pangkajene Sidenreng,      September 2019

Pihak Kedua,



**Ir. H. ANDI FAISAL BANGGONG, MT**  
 NIP: 19690507 199903 1 010

Pihak Pertama,



**HALMAN, S.Sos**  
 NIP: 19621231 199803 1 166



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HUSNIWATY, SE, M.A.P**  
Jabatan : Kabid. Kesatuan Bangsa

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. H. ANDI FAISAL RANGGONG, MT**  
Jabatan : Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkajene Sidenreng, September 2019

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

  
**Ir. H. ANDI FAISAL RANGGONG, MT**  
NIP:19690527 199903 1 010

  
**HUSNIWATY, SE, M.A.P**  
NIP: 19720409 200212 2 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**BIDANG KESATUAN BANGSA**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KAB. SIDENRENG RAPPANG**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase masyarakat yang mendapatkan pembinaan terkait belanegara	100 %
2.	Mengoptimalkan Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase koordinasi Tim dalam rangka cegah dini dan deteksi dini	100 %
3.	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan	Persentase masyarakat yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	100 %
		Persentase ormas yang bertentangan dengan asas pancasila	0 %
4.	Meningkatnya Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase masyarakat yang mendapatkan penyuluhan wawasan kebangsaan	100 %

**KEGIATAN**

**ANGGARAN**


1. Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rp. 53.939.000
2. Forum Silaturahmi Forkompinda Bersama Masyarakat	Rp. 419.201.000
3. Penguatan Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini	Rp. 136.641.000
4. Pemantauan dan Pengendalian Penyakit Masyarakat	Rp. 50.000.000
5. Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	Rp. 25.000.000
6. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	RP. 48.564.000
7. Seminar, Talkshow, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Rp. 165.000.000
8. Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Rp. 100.299.000

Pangkajene Sidenreng,      September 2019

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

  
**Ir. H. ANDI FAISAL RANGGONG, MT**  
 NIP:19690507 199903 1 010

  
**HUSNIWATY, SE, M.A.P**  
 NIP: 19720409 200212 2 002





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HAIRUDDIN HANAFAI, S.IP**  
Jabatan : Kasubag. Perencanaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. H. ANDI BAHARUDDIN, M. Adm. Pemb.**  
Jabatan : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkajene Sidenreng, September 2019

Pihak Kedua,

**Drs. H. ANDI BAHARUDDIN, M. Adm. Pemb.**  
NIP:19670505 200212 1 005

Pihak Pertama,

**HAIRUDDIN HANAFAI, S.IP**  
NIP: 19700909 199102 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**SUB BIDANG PERENCANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KAB. SIDENRENG RAPPANG**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Mengoptimalkan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 laporan

**KEGIATAN**

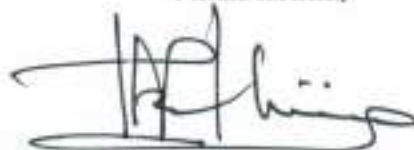
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD

**ANGGARAN**

Rp. 26.688.000

Pangkajene Sidenreng,      September 2019

Pihak Kedua,



**Drs. H. ANDI BAHARUDDIN, M. Adm. Pemb.**  
NIP:19670505 200212 1 005

Pihak Pertama,



**HAIRUDDIN HANAFLI, S.IP**  
NIP: 19700909 199102 1 001



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ANDI NASRUDDIN, ST**  
Jabatan : Kasubag. Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. H. ANDI BAHARUDDIN, M. Adm. Pemb.**  
Jabatan : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkajene Sidenreng, September 2019

Pihak Kedua,

**Drs. H. ANDI BAHARUDDIN, M. Adm. Pemb.**  
NIP:19670505 200212 1 005

Pihak Pertama,

**ANDI NASRUDDIN, ST**  
NIP: 19670808 200312 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019  
SUB BIDANG UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KAB. SIDENRENG RAPPANG**

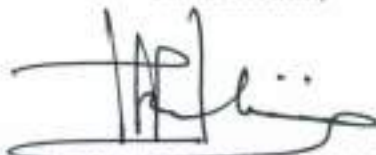
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Menyediakan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai	220 lbr
2.	Menyediakan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	12 bln
3.	Menyediakan Jasa Kebersihan Kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bln
4.	Menyediakan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	61 buah
5.	Menyediakan Bahan Bacaan dan Peraturan dan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	36 eks
6.	Menyiapkan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	34 kali
7.	Menyiapkan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	55 kali
8.	Menyediakan Pelayanan Adm Perkantoran	Waktu penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	12 bln



KEGIATAN	ANGGARAN
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 1.110.000
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 18.000.000
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp. 21.628.000
4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 2.452.000
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan dan Perundang-undangan	Rp. 3.840.000
6. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rp. 130.000.000
7. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam daerah	Rp. 6.000.000
8. Pelayanan Adm Perkantoran	Rp. 195.542.000

Pangkajene Sidenreng, September 2019

Pihak Kedua,



**Drs. H. ANDI BAHARUDDIN, M. Adm. Pemb.**  
NIP:19670505 200212 1 005

Pihak Pertama,



**ANDI NASRUDDIN, ST**  
NIP: 19670808 200312 1 003



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MARYANI, S. Sos**  
Jabatan : Kasubag. Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. H. ANDI BAHARUDDIN, M. Adm. Pemb.**  
Jabatan : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkajene Sidenreng, September 2019

Pihak Kedua,

**Drs. H. ANDI BAHARUDDIN, M. Adm. Pemb.**  
NIP:19670505 200212 1 005

Pihak Pertama,

**MARYANI, S. Sos**  
NIP: 19820813 200901 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**SUB BIDANG KEUANGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KAB. SIDENRENG RAPPANG**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Menyediakan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah	12 bln
2.	Menyediakan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kend dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	R4=2, R2=10 unit
3.	Menyediakan Jasa Administrasi Keuangan	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	12 bln
4.	Mengadakan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang di adakan	30 buah
5.	Mengadakan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang di adakan	3 unit
6.	Melaksanakan Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	1 unit
7.	Melaksanakan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang di pelihara rutin/berkala.	R4=2, R2=10 unit
8.	Melaksanakan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang di pelihara rutin/berkala.	5 unit
9.	Melaksanakan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang di pelihara rutin/berkala.	6 unit

KEGIATAN	ANGGARAN
1. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Rp. 5.000.000
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kend dinas/Operasional	Rp. 4.645.000
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Rp. 74.648.000
4. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Rp. 38.883.000
5. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Rp. 11.250.000
6. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor	Rp. 9.288.000
7. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rp. 71.904.000
8. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung Kantor	Rp. 1.750.000
9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Rp. 3.000.000

Pangkajene Sidenreng, September 2019

Pihak Kedua,



**Drs. H. ANDI BAHARUDDIN, M. Adm. Pemb.**  
NIP:19670505 200212 1 005

Pihak Pertama,



**MARYANI, S. Sos**  
NIP: 19820813 200901 2 001



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ANDI ANSAR SAPPAILE, S. TI**  
Jabatan : Kasubid. Kelembagaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HALMAN, S.Sos**  
Jabatan : Kabid. Hubungan Antar Lembaga

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkajene Sidenreng, September 2019

Pihak Kedua,

**HALMAN, S. Sos**  
NIP: 19621231 199803 1 166

Pihak Pertama,

**ANDI ANSAR SAPPAILE, S. TI**  
NIP: 19751201 200312 1 01



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019  
SUB BIDANG KELEMBAGAAN  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KAB. SIDENRENG RAPPANG**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya masyarakat yang paham tentang politik	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan penyuluhan pendidikan politik	130 org
2.	Tersusunnya dokumen administrasi bantuan keuangan parpol	Jumlah dokumen LPJ Bantuan Keuangan Parpol	11 dok

**KEGIATAN**

1. Penyuluhan Kepada Masyarakat
2. Penyusunan Administrasi Bantuan Parpol

**ANGGARAN**

- Rp. 50.000.000  
Rp. 48.980.000

Pangkajene Sidenreng,      September 2019

Pihak Kedua,

  
**HALMAN, S. Sos**  
NIP: 19621231 199803 1 166

Pihak Pertama,

  
**ANDI ANSAR SAPPAILE, S. TI**  
NIP: 19751201 200312 1 01



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MAMMARIA MUIN, SE**  
Jabatan : Kasubid. Hubungan Organisasi Kemasyarakatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HALMAN, S.Sos**  
Jabatan : Kabid. Hubungan Antar Lembaga

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkajene Sidenreng, September 2019

Pihak Kedua,

**HALMAN, S.Sos**  
NIP: 19621231 199803 1 166

Pihak Pertama,

**MAMMARIA MUIN, SE**  
NIP: 19660119 200701 2 008

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**SUB BIDANG HUBUNGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KAB. SIDENRENG RAPPANG**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya pemahaman tentang undang-undang ormas	Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan sosialisasi undang-undang ormas	100 org

**KEGIATAN**

1. Monitoring Evaluasi dan Pengawasan Ormas

**ANGGARAN**

Rp. 26.990.000

Pangkajene Sidenreng,      September 2019

Pihak Kedua,



**HALMAN, S.Sos**  
NIP: 19621231 199803 1 166

Pihak Pertama,



**MAMMARIA MUIN, SE**  
NIP: 19660119 200701 2 008





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HANRIYANI DARUL FACHSA, SE**  
Jabatan : Kasubid. Wawasan Kebangsaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HUSNIWATY, SE, M.A.P**  
Jabatan : Kabid. Kesatuan Bangsa

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkajene Sidenreng, September 2019

Pihak Kedua,

**HUSNIWATY, SE, M.A.P**  
NIP: 19720409 200212 2 002

Pihak Pertama,

**HANRIYANI DARUL FACHSA, SE**  
NIP: 19810219 201001 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019  
SUB BIDANG WAWASAN KEBANGSAAN  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KAB. SIDENRENG RAPPANG**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya koordinasi Forkompimda Bersama Masyarakat	Jumlah Koordinasi Tim Forkopimda	12 bln
2.	Terkoordinasinya Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini	Jumlah laporan Kewaspadaan Dini	12 laporan
3.	Terpantaunya Pengendalian Penyakit Masyarakat	Jumlah pemantauan dan pengendalian penyakit masyarakat	2 kali
4.	Terciptanya kerukunan antar dan intra umat beragama	Jumlah dewan penasehat dan pengurus FKUB yang berkoordinasi	30 org
5.	Meningkatnya wawasan kebangsaan di masyarakat	Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan dalam rangka peningkatan wawasan kebangsaan	420 org

**KEGIATAN**

**ANGGARAN**

1. Forum Silaturahmi Forkompimda Bersama Masyarakat	Rp. 419.201.000
2. Penguatan Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini	Rp. 136.641.000
3. Pemantauan dan Pengendalian Penyakit Masyarakat	Rp. 50.000.000
4. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	RP. 48.564.000
5. Seminar, Talkshow, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Rp. 165.000.000

Pangkajene Sidenreng,      September 2019

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**HUSNIWATY, SE, M.A.P**  
NIP: 19720409 200212 2 002

**HANRIYANI DARUL FACHSA, SE**  
NIP: 19810219 201001 2 001



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dra. Hj. RAHMA, M.A.P**  
Jabatan : Kasubid. Pembauran

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HUSNIWATY, SE, M.A.P**  
Jabatan : Kabid. Kesatuan Bangsa

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkajene Sidenreng, September 2019

Pihak Kedua,

**HUSNIWATY, SE, M.A.P**  
NIP: 19720409 200212 2 002

Pihak Pertama,

**Dra. Hj. RAHMA, M.A.P**  
NIP: 19680615 200312 2 007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019  
SUB BIDANG PEMBAURAN  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KAB. SIDENRENG RAPPANG**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Menyiapkan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan belanegara	130 org
2.	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan	65 org
3.	Terciptanya Pembauran di Masyarakat	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan pembauran kebangsaan dan rapat koordinasi FPK	198 org

**KEGIATAN**

1. Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
2. Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa
3. Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)

**ANGGARAN**

- Rp. 53.939.000  
Rp. 25.000.000  
Rp. 100.299.000

Pangkajene Sidenreng,      September 2019

Pihak Kedua,



**HUSNIWATY, SE, M.A.P**  
NIP: 19720409 200212 2 002

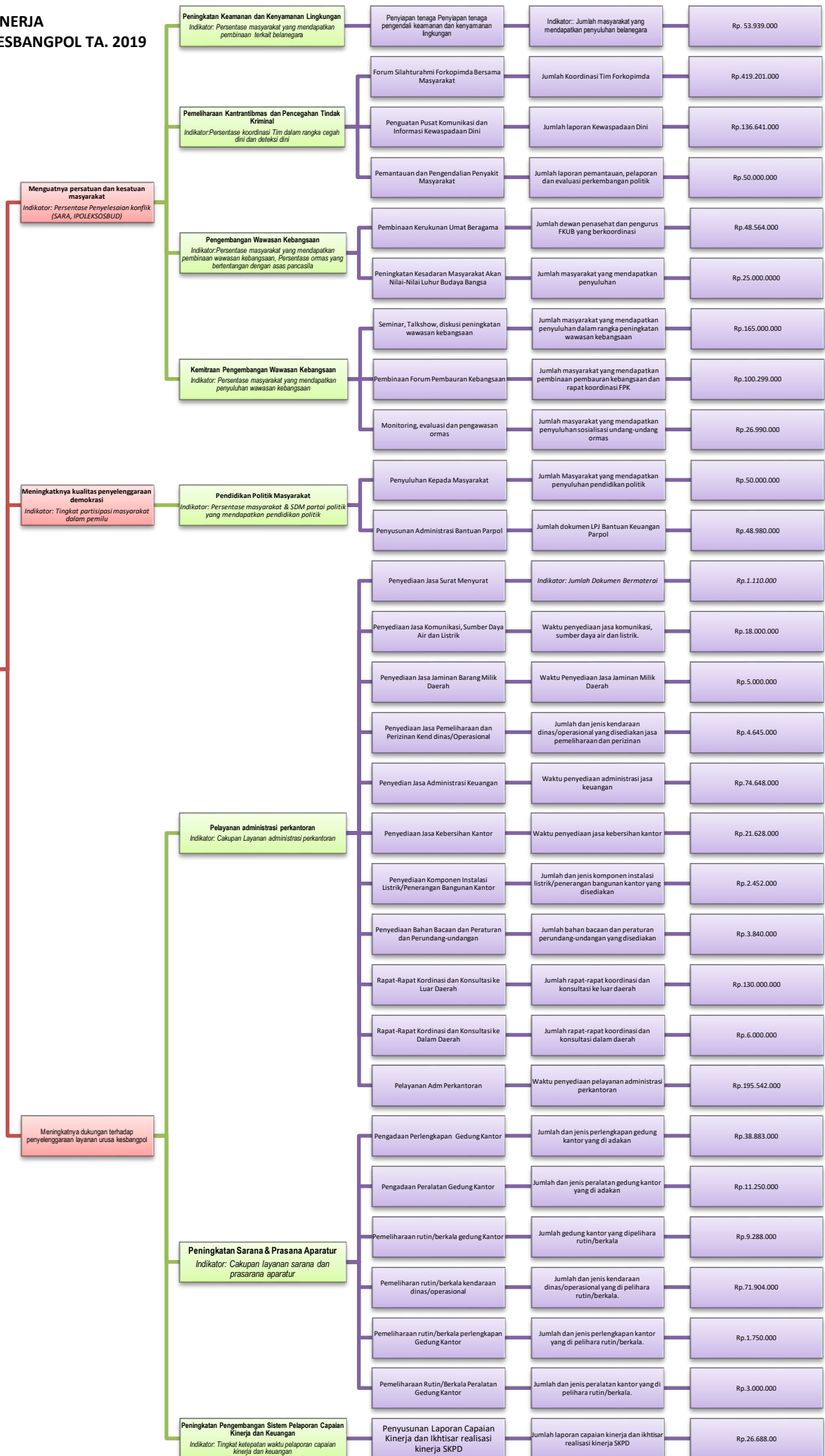
Pihak Pertama,



**Dra. Hj. RAHMA, M.A.P**  
NIP: 19680615 200312 2 007

**POHON KINERJA  
BADAN KESBANGPOL TA. 2019**

**MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN DAN KENYAMANAN DI WILAYAH KAB. SIDRAP**  
Indikator: persentase angka kriminalitas per 10.000







NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2019	PROGRAM	ANGGARAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET TAHUNAN	TARGET TRIWULAN				WAKTU PELAKSANAAN DAN				PENANGGUNG JAWAB
												I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				14				15
								Pelayanan Adm Perkantoran	Waktu penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	Rp195.542.000	12 bln	3	3	3	3	√	√	√	√	Sekretariat
						Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	Rp 136.075.000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang di adakan	Rp 38.883.000	30	2	0	25	3	√		√	√	Sekretariat
								Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang di adakan	Rp 11.250.000	2	0	0	2	0			√		Sekretariat
								Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	Rp 9.288.000	1 unit	1	1	0	1	√	√		√	Sekretariat
								Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang di pelihara rutin/berkala	Rp 71.904.000	12 unit	12	0	12	12	√		√	√	Sekretariat
								Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang di pelihara rutin/berkala	Rp 1.750.000	5 unit	5	0	0	0	√				Sekretariat
								Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang di pelihara rutin/berkala	Rp 3.000.000	6 unit	3	0	1	2	√		√	√	Sekretariat
						Peningkatan Pengembangan Sistem	Rp 26.688.000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Rp 26.688.000	5 dok	2	1	2	0	√	√	√		Sekretariat

**HASIL PENGUKURAN ATAS  
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. SIDENRENG RAPPANG**

No.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	RENCANA AKSI		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	<i>Menguatnya persatuan dan kesatuan masyarakat</i>	<i>Persentase penyelesaian konflik (SARA, IPOLEKSOSBUD)</i>	%	100	100	100%
2	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase masyarakat yang mendapatkan pembinaan terkait belanegara	%	100	100	100%
3	Menyiapkan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan belanegara	%	130	130	100%
4	<i>Mengoptimalkan Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal</i>	Persentase koordinasi Tim dalam rangka cegah dini dan deteksi dini	%	100	100	100%
5	<i>Meningkatnya koordinasi Forkompimda Bersama Masyarakat</i>	Jumlah Koordinasi Tim Forkopimda	bln	12	12	100%
6	<i>Terkoordinasinya Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini</i>	Jumlah laporan Kewaspadaan Dini	laporan	12	12	100%
7	<i>Terpantaunya Pengendalian Penyakit Masyarakat</i>	Jumlah pemantauan dan pengendalian penyakit masyarakat	kali	2	2	100%
8	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan	Persentase masyarakat yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	%	100	100	100%
		Persentase ormas yang bertentangan dengan asas pancasila	%	0	0	100%
9	Terciptanya kerukunan antar dan intra umat beragama	Jumlah dewan penasehat dan pengurus FKUB yang berkoordinasi	org	30	30	100%
10	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan	org	65	65	100%
11	Meningkatnya Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase masyarakat yang mendapatkan penyuluhan wawasan kebangsaan	org	100	100	100%
12	Meningkatnya wawasan kebangsaan di masyarakat	Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan dalam rangka peningkatan wawasan kebangsaan	org	420	420	100%



13	Terciptanya Pembauran di Masyarakat	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan pembauran kebangsaan dan rapat koordinasi FPK	org	198	198	100%
14	Meningkatnya pemahaman tentang undang-undang ormas	Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan sosialisasi undang-undang ormas	org	100	100	100%
15	<b>Meningkatkan kualitas penyelenggaraan demokrasi</b>	<b>Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu</b>	%	<b>83,60</b>	<b>83,60</b>	<b>100%</b>
16	<b>Meningkatnya masyarakat yang paham tentang politik</b>	<b>Persentase masyarakat &amp; SDM partai politik yang mendapatkan pendidikan politik</b>	%	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100%</b>
17	Meningkatnya masyarakat yang paham tentang politik	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan penyuluhan pendidikan politik	org	130	130	100%
18	Tersusunnya dokumen administrasi bantuan keuangan parpol	Jumlah dokumen LPJ Bantuan Keuangan Parpol	dok	11	11	100%
19	<b>Meningkatnya Dukungan Terhadap Penyelenggaraan Layanan Urusan Kesbangpol</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
20	Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan Layanan administrasi perkantoran	%	100	90	99,52%
21	Menyediakan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai	lembar	220	220	100%
22	Menyediakan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	bulan	12	12	100%
23	Menyediakan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah	bln	12	12	100%
24	Menyediakan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kend dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	unit	12	10	83,33%
25	Menyediakan Jasa Administrasi Keuangan	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	bulan	12	12	100%
26	Menyediakan Jasa Kebersihan Kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	bulan	12	12	100%
27	Menyediakan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	buah	61	61	100%
28	Menyediakan Bahan Bacaan dan Peraturan dan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	eksamplar	36	24	66,67%
29	Menyiapkan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	kali	34	34	100%
30	Menyiapkan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	kali	55	44	80%
31	Menyediakan Pelayanan Adm Perkantoran	Waktu penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	bulan	12	12	100%
32	<b>Meningkatnya Sarana &amp; Prasana Aparatur</b>	<b>Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur</b>	%	<b>100</b>	<b>98</b>	<b>91,19%</b>

33	Mengadakan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang di adakan	<i>buah</i>	30	30	<b>100%</b>
34	Mengadakan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang di adakan	<i>unit</i>	3	3	<b>100%</b>
35	Melaksanakan Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	<i>unit</i>	1	1	<b>100%</b>
36	Melaksanakan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang di pelihara rutin/berkala.	<i>unit</i>	12	10	<b>83,33%</b>
37	Melaksanakan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang di pelihara rutin/berkala.	<i>unit</i>	5	5	<b>100%</b>
38	Melaksanakan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang di pelihara rutin/berkala.	<i>unit</i>	6	6	<b>100%</b>
39	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	100	<b>100%</b>
40	Mengoptimalkan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	laporan	5	5	<b>100%</b>
<b>Rata-rata capaian</b>						<b>99,52%</b>

Pangkajene Sidenreng, 14 Januari 2020

**Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**



**INDAH SAID ROEM, SE, M.A.P**

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP: 19640610 199307 2 002

**RENCANA AKSI  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM	ANGGARAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET TAHUNAN	MONITORING RENCANA AKSI												
											TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV			
											Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Terciptanya masyarakat yang berideologi Pancasila, berwawasan kebangsaan, demokratis, berketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Menguatnya persatuan dan kesatuan masyarakat	Persentase penyelesaian konflik (SARA, IPOLEKSOSBUD)	100%	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan	Rp 53.939.000	Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan lingkungan	Rp 53.939.000	130 Org	130	0	0%	130	130	100%	130	130	100%	130	130	100%	
						Rp 605.842.000	Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Jumlah Koordinasi Forkopimda Bersama Masyarakat	Rp 419.201.000	12 bln	3	3	100%	6	6	100%	9	9	100%	12	12	100%	
						Rp 136.641.000	Penguatan Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini	Jumlah laporan Kewaaspadaan Dini	Rp 136.641.000	12 bln	3	3	100%	6	6	100%	9	9	100%	12	12	100%	
						Rp 50.000.000	Pemantauan dan Pengendalian Penyakit Masyarakat	Jumlah pemantauan dan pengendalian penyakit masyarakat	Rp 50.000.000	2 kali	0	0	0%	0	0	0%	2	2	100%	2	2	100%	
						Rp 73.564.000	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	Rp 25.000.000	65 org	65	0	0%	65	65	100%	65	65	100%	65	65	100%	
						Rp 48.564.000	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Jumlah Rapat koordinasi FKUB	Rp 48.564.000	30 org	0	0	0%	0	0	0%	30	0	0%	30	30	100%	
						Rp 292.289.000	Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Seminar, Talkshow, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	Rp 165.000.000	420 org	0	0	0%	290	290	100%	290	290	100%	420	420	100%	
						Rp 100.299.000	Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan pembauran kebangsaan dan rapat koordinasi FPK	Rp 100.299.000	198 org	0	0	0%	0	0	0%	33	0	0%	198	198	100%	
						Rp 26.990.000	Monitoring, evaluasi dan pengawasan ormas	Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan sosialisasi undang-undang ormas	Rp 26.990.000	100 org	0	0	0%	100	0	0%	100	100	100%	100	100	100%	
						Rp 98.980.000	Penyuluhan Kepada Masyarakat	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik	Rp 50.000.000	130 org	130	0	0%	130	130	100%	130	130	100%	130	130	100%	
		Rp 48.980.000	Penyusunan Administrasi Bantuan Parpol	Jumlah dokumen LPJ Bantuan Keuangan Parpol	Rp 48.980.000	11 dok	0	0	0%	11	0	0%	11	11	100%	11	11	100%					
		Rp 1.110.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai Menyurat	Rp 1.110.000	220 lbr	115	0	0%	115	115	100%	220	115	52%	220	220	100%					
		Rp 18.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	Rp 18.000.000	12 bln	3	3	100%	6	6	100%	9	9	100%	12	12	100%					
		Rp 5.000.000	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah	Rp 5.000.000	12 bln	12	12	100%	12	12	100%	12	12	100%	12	12	100%					
		Rp 4.645.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kend dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	Rp 4.645.000	12 unit	0	0	0%	0	0	0%	10	6	60%	12	10	83%					
Rp 74.648.000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	Rp 74.648.000	12 bln	3	3	100%	6	6	100%	9	9	100%	12	12	100%							

				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp 21.628.000	12 bln	3	3	100%	6	6	100%	9	9	100%	12	12	100%
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Rp 2.452.000	61 buah	20	20	100%	20	20	100%	44	44	100%	61	61	100%
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Rp 3.840.000	36 eksamplar	9	6	67%	18	12	67%	27	18	67%	36	24	67%
				Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp 130.000.000	34 kali	10	7	70%	10	10	0%	24	20	83%	34	34	100%
				Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rp 6.000.000	55 kali	28	12	0%	28	17	61%	28	27	96%	55	44	80%
				Pelayanan Adm Perkantoran	Waktu penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	Rp 195.542.000	12 bln	3	3	100%	6	6	100%	9	9	100%	12	12	100%
	Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	Rp 136.075.000		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang di adakan	Rp 38.883.000	30	2	2	100%	2	2	100%	27	27	100%	30	30	100%
				Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang di adakan	Rp 11.250.000	2	0	0	0%	2	0	0%	2	2	100%	2	2	100%
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	Rp 9.288.000	1 unit	0	0	0%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang di	Rp 71.904.000	12 unit	5	5	100%	5	5	0%	8	8	100%	12	10	83%
				Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang di pelihara rutin/berkala.	Rp 1.750.000	5 unit	5	2	40%	5	3	60%	5	7	140%	5	7	140%
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang di pelihara rutin/berkala.	Rp 3.000.000	6 unit	3	0	0%	3	0	0%	4	0	0%	6	6	100%
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan	Rp 26.688.000		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Rp 26.688.000	5 dok	2	2	100%	3	3	100%	5	5	100%	5	5	100%

Pangkajene Sidenreng, 14 Januari 2019  
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,

**INDAH SAID ROEM, SE, M.A.P**

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP: 19640610 199307 2 002



**INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
TAHUN 2019**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN
1	Menguatnya Persatuan dan Kesatuan Masyarakat	Persentase Penyelesaian Konflik (SARA, IPOLEKSOSBUD)	$\frac{\text{Jumlah konflik yang tertangani}}{\text{Jumlah konflik}} \times 100\%$
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Demokrasi	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu	$\frac{\text{Jumlah Pengguna Hak Pilih}}{\text{Jumlah DPT}} \times 100\%$

Pangkajene Sidenreng, Juli 2019

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,





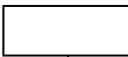






**I. H. ANDEFAISAL RANGGONG, MT**

NIP. 19690607 199903 1 010



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
SUB BAGIAN PERENCANAAN**

NOMOR SOP	
TGL. PEMBUATAN	5 Januari 2018
TGL. REVISI	
TGL. EFEKTIF	5 Januari 2018
TGL. PENGESAHAN	5 Januari 2015
DISAHKAN OLEH	<b>Pt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA &amp; POLITIK</b>  <b><u>Drs. H. ANDI BAHARUDDIN, M. Adm. Pemb.</u></b> Pangkat : Pembina Tk. I NIP : 19670505 200212 1 005
NAMA SOP	<b>PENGUMPULAN DATA KINERJA</b>
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/21/M/PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 2. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang;	1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait 2. Memahami sasaran dan capaian program
Keterkaitan :	Peralatan Perlengkapan :
1. SOP Penerimaan Surat Masuk Sub Bagian pada Sekretariat; 2. SOP Penerimaan Surat Masuk pada Sekretaris;	1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku 2. Data dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan program 3. ATK 4. Komputer/Laptop + Printer
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan
Apabila pengumpulan data kinerja tidak terselesaikan dengan baik dan benar maka kegiatan pelaporan akan terhambat	Setiap tahap kegiatan terdokumentasi dengan baik, baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Sekretaris	Kasubag. Perencanaan	Tim SAKIP	Pengadministrasi Umum	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menginstruksikan pengumpulan data kinerja					Struktur Organisasi	15 menit	Draf Tim	
2.	Membentuk Tim					Draf Tim	30 menit	Tim	
3.	Menyusun Rencana kegiatan, pelaksanaan kegiatan pengumpulan data					Tim	3 hari	Rencana Kegiatan Pengumpulan data	
4.	Menghimpun data kinerja, menyusun konsep laporan					Data Kinerja	1 hari	Konsep laporan hasil pengumpulan data	
5.	Laporan kasubag ke sekretaris terkait pengumpulan data					Konsep laporan data kinerja	1 hari	Drafft dokumen penetapan kinerja siap diajukan ke sekretaris	
6.	Melakukan Rapat dengan Tim SAKIP					Data kinerja	1 hari	Lpaoran final	
·	Hasil pengumpulan data kinerja					Data kinerja yang telah diparaf	1 hari	Lpaoran yang sudah ditanda tangani	







PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A No. 7 Kab. Sidrap Kode pos 91611

---

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR : 15 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  4. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018;
  8. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang;

- Menetapkan : **MEMUTUSKAN :**
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkajene Sidenreng  
Pada Tanggal : 26 juli 2019

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa & Politik



**Ir. H. ANDI FAISAL RANGGONG, MT**

Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19690507 199903 1 010

Tembusan :

1. Bupati Sidenreng Rappang di Pangkajene
2. Wakil Bupati Sidenreng Rappang di Pangkajene;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene
4. Kepala Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene;
5. Inspektorat Kabupaten
6. Peninggal..

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR : 15 TAHUN 2019  
TANGGAL : 26 JULI 2019**

1. Nama Unit Organisasi : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabuapten Sidenreng Rappang
2. Tugas : Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah
3. Fungsi : Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kesatuan bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan di bidang hubungan antar lembaga dan bidang kesatuan bangsa;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan antar lembaga dan bidang kesatuan bangsa;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan antar lembaga dan bidang kesatuan bangsa;
  - d. pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN
1	Menguatnya Persatuan dan Kesatuan Masyarakat	Persentase Penyelesaian Konflik (SARA, IPOLEKSOSBUD)	$\frac{\text{Jumlah konflik yang tertangani}}{\text{Jumlah konflik}} \times 100\%$
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Demokrasi	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu	$\frac{\text{Jumlah Pengguna Hak Pilih}}{\text{Jumlah DPT}} \times 100\%$

Ditetapkan : di Pangkajene Sidenreng  
Pada Tanggal : 26 Juli 2019

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa & Politik



**Ir. H. ANDI FAISAL RANGGONG, MT**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19690507 199903 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jalan Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A No. 7 Kab. Sidrap Kode pos 91611

---

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR : 12/ VII /2020**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN/PENETAPAN PENGUMPUL DATA LAPORAN KINERJA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk tertib dan terciptanya akuntabilitas kinerja pemerintahan yang baik, maka dipandang perlu menunjuk/menetapkan pengumpul Data Laporan Kinerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tentang Penunjukan/Penetapan Pengumpul Data laporan Kinerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nonmor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 306/V/2019 tentang Penunjukan/Penetapan Penanggungjawab Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) dan Perjanjian Kinerja (PK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk/Menetapkan Petugas Pengumpul Data Laporan Kinerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut:

KEDUA : Nama : ELSYE FEBRYANI PARAMEAN, A. Md  
NIP : 19840208 201503 2 002  
Pangkat : Pengatur Tk. I, II/d  
Jabatan : Pengelola Program dan Kegiatan

KETIGA : Pengumpul Data laporan Kinerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas, sebagai berikut:  
a. Mempelajari Pedoman dan Petunjuk Pengumpulan Data.  
b. Mempersiapkan bahan dan alat kerja dalam pelaksanaan tugas pengumpul data agar tugas dapat terlaksana dengan baik dan benar.  
c. Mengumpulkan data dan informasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan disposisi atasan dengan mencatat secara sistematis dan mengklarifikasikan serta menginventarisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar diperoleh data yang benar dan akurat.  
d. Menyajikan data yang telah diolah dalam bentuk laporan kepada pejabat yang memerlukan sesuai petunjuk atasan.  
e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Pangkajene Sidenreng  
Pada Tanggal : 10 Juli 2020

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,

  
**Ir. ANDI FAISAL RANGGONG, MT**

Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 196905071999031010

Tembusan :

1. Bupati Sidenreng Rappang sebagai Laporan;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui daan dilaksanakan;
3. Pertinggal.





PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Alamat: Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A No. 7 Kab. Sidrap Kpde Pos 91611

---

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR : 01 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN/PENGANGKATAN TIM PENYUSUN  
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP)  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2019, maka dipandang perlu ditetapkan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Penunjukan/Pengangkatan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 6);

7. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 22a Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk/Mengangkat Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Tahun Anggaran 2019 Lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga/Petugas sebagaimana di maksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bertugas Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Tahun Anggaran 2019.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Pangkajene Sidenreng  
Pada Tanggal : 14 Januari 2020

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



**INDAH SAID ROEM, SE, M.A.P**

Pangkat: Pembina Tk. I

NIP : 19640610 199307 2002

Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Sidenreng Rappang Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah  
Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene;  
2. Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene;

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR : 01 TAHUN 2020  
TANGGAL : 14 JANUARI 2020**

**PENUNJUKAN/PENGANGKATAN TIM PENYUSUN  
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP)  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
TAHUN ANGGARAN 2019**

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>
1.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pengarah
2.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketua
3.	Kasubag. Perencanaan.	Sekretaris
4.	Pengelola Program dan Kegiatan	Anggota

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



**INDAH SAID ROEM, SE, M.A.P**

Pangkat: Pembina Tk. I

NIP : 19640610 199307 2002